

# *Factors Influencing the Implementation of the Comprehensive Neonatal Emergency Obstetric Services Program Policy*

## **[Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif]**

Rosalina Septi Arcellya<sup>1)</sup>, Cholifah<sup>\*2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi S1 Kebidanan, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi S1 Kebidanan, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email : [cholifah@umsida.ac.id](mailto:cholifah@umsida.ac.id)

**Abstract.** *Health policy implementation plays an important role in the health policy phase that will be implemented. Based on an initial survey at RSUD AL-Islam H.M Mawardi of the achievements of PONEK quality indicators in June 2023, response time CITO  $\leq 30$  minutes was 54.7%, this figure does not meet the standards set by the Ministry of Health of 100%. The aim of this research is to determine the factors that influence the implementation of the Comprehensive Neonatal Emergency Obstetric Services Program (PONEK) policy. Quantitative Research, Data collection through questionnaires with Likert scale. The population of hospital employees, PONEK team sample, 54 people. Univariate and Bivariate data analysis using Pearson correlation test. Primary data source. The research results show that Communication influences policy implementation, Resources influences policy implementation, Disposition influences policy implementation and Bureaucratic Structure influences PONEK Program policy implementation.*

**Keywords** - *implementation, policy, program, service obstetri neonatal emergency comprehensif*

**Abstrak.** Implementasi kebijakan kesehatan memegang peranan penting dalam tahapan kebijakan kesehatan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan survei awal di RSUD AL-Islam H.M Mawardi terhadap capaian indikator mutu PONEK pada bulan Juni 2023, respon time CITO  $\leq 30$  menit sebesar 54,7%, angka tersebut belum memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan sebesar 100%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Program Pelayanan Obstetri Darurat Neonatal Komprehensif (PONEK). Penelitian Kuantitatif, Pengumpulan data melalui kuesioner dengan skala likert. Populasi pegawai rumah sakit sampel tim PONEK sebanyak 54 orang. Analisis data secara univariat dan bivariat menggunakan uji korelasi Pearson. Sumber data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, Sumberdaya berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, Disposisi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dan Struktur Birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Program PONEK.

**Kata Kunci** - *implementasi, kebijakan, program, pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif*

## I. PENDAHULUAN

Salah satu upaya pemerintah dan World Health Organization (WHO) untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi adalah dilaksanakannya Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah sakit [1]. Ada beberapa cara dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendukung program tersebut dengan pemberian sosialisasi, tersedianya sarana prasarana, peningkatan SDM PONEK, diterapkannya standar pelayanan, dikukuhkannya kebijakan kesehatan, tata laksana administrasi kesehatan serta berkoordinasi dengan beberapa organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan bidang swasta [2]. Angka Kematian Ibu merupakan deskripsi dari status atau derajat kesehatan dalam kaitannya dengan mutu pelayanan kesehatan, kemajuan pembangunan, serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di suatu negara. Tercatat pada tahun 2017, 810 perempuan meninggal setiap hari dan 94% berada di negara berkembang (WHO). Tahun 2018 AKB adalah 18 per 1.000 kelahiran hidup. Tingginya AKI dan AKB dikarenakan komplikasi selama hamil dan bersalin [3].

Kebijakan kesehatan nasional dirumuskan sesuai UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden No 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Kebijakan ini menguraikan arah, tujuan, kebijakan, dasar, dan landasan seluruh penyelenggaraan kesehatan di Indonesia. Dalam mengembangkan kebijakan terdapat siklus kebijakan kesehatan yang dibagi menjadi lima tahap : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan [4]. Implementasi kebijakan kesehatan memegang peranan penting

dalam siklus kebijakan kesehatan dan tahapan pelaksanaannya. Teori implementasi kebijakan George Edward III dalam (Mubarak, *et.al* :2005) terdapat empat variabel dalam proses implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kesulitan terbesar mengembangkan kebijakan, memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dalam praktiknya. Implementasi kebijakan harus dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor berpengaruh yang dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan atau memperbaiki kebijakan dimasa depan [4].

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Pratama, *et.al* :2022) meskipun jumlah sumber daya manusia cukup memadai, pelatihan untuk petugas belum menyeluruh. Peralatan dan infrastruktur yang tersedia belum mencukupi dan beberapa peralatan perlu diperbarui, pengelolaannya baik dan sistem pendanaan berasal dari lembaga publik setempat; SOP yang diterapkan belum memadai, Sistem informasinya sudah menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit, namun pencatatan tetap dilakukan dalam bentuk tertulis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Anita Chudari, *et.al* :2016) standar kebijakan adalah ditetapkan oleh pemerintah. Rumah Sakit telah mengeluarkan SK tim PONEK, Standar Operasional Prosedur Penerimaan dan perawatan pasien serta SOP pendelegasian wewenang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Bidan, *et.al* :2022) Dalam hal karakteristik organisasi dan sikap pelaksana, hal-hal seperti standar, sasaran, tujuan, dan kebijakan program PONEK, sumber daya, dan komunikasi antar organisasi termasuk dalam kategori baik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rachman, *et.al* :2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor input yang meliputi sumber daya manusia diketahui telah mendapatkan pelatihan program asuhan kegawatdaruratan obstetri neonatus secara komprehensif. Petugas program pelayanan kegawatdaruratan obstetri neonatus komprehensif yang digilir ke tempat lain. Dana berasal dari RBA (Budget Cost Plan). Sarana dan prasarana sudah tersedia, tetapi belum memadai. Pembagian tugas program asuhan kegawatdaruratan obstetri neonatus komprehensif disesuaikan dengan kompetensi masing-masing petugas dan pencatatan serta pelaporan kegiatan dilakukan oleh DR.RM.RS Djoelham Binjai dengan format yang disediakan. Namun, format pelaporan sering berfluktuasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Pohan, *et.al* :2021) Hasil penelitian menemukan bahwa pendanaan PONEK berasal dari Badan Layanan Umum Daerah. Banyak anggota tim yang tidak terlatih dan tidak tersertifikat oleh PONEK, fasilitas tersedia 24 jam termasuk unit tranfusi darah [5].

RSU AL-Islam H.M Mawardi berupaya memenuhi persyaratan layanan PONEK sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh karena itu, koordinasi yang baik antara semua pemangku kepentingan di rumah sakit sangat diperlukan untuk memastikan terlaksananya layanan program PONEK. Berdasarkan hasil survey awal di RSU AL-Islam H.M Mawardi dari capaian indikator mutu PONEK pada bulan juni 2023 angka respon time cito  $\leq 30$  menit sebesar 54,7% angka tersebut belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kemenkes yaitu sebesar 100%.

Gap penelitian dengan penelitian sebelumnya, dalam implementasi program PONEK belum terlaksana dengan maksimal. Seperti penelitian (Anita Chaudhari, *et.al* :2016) kurangnya literatur dalam studinya meneliti implementasi kebijakan layanan ponek [5]. (Pohan, *et.al* :2021) perlu adanya evaluasi internal terkait implementasi program ponek, pada penelitian (Pratama, *et.al* :2022) perlu adanya anggaran khusus diperuntukkan peningkatan skill petugas ponek dan pemberian insentif. (Bidan, *et.al* :2022) Aspek standar, sasaran, tujuan kebijakan program PONEK, sumber daya, komunikasi antar organisasi termasuk dalam kategori baik. Dengan demikian, perlu adanya penambahan indikator konsistensi agar dapat mengimplementasikan program ponek dengan maksimal. Berdasarkan fenomena permasalahan tersebut, penelitian ini menarik untuk dianalisis lebih mendalam tentang faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) di RSU AL-Islam H.M Mawardi dengan pendekatan teori implementasi kebijakan kesehatan George Edward III Tahun 2023.

Originalitas pada penelitian ini terdapat dalam penggunaan indikator konsistensi pada variabel komunikasi yang tidak terdapat dalam penelitian sebelumnya [5][6][7][8][9]. Sedangkan menurut penelitian (Edward, 1980) dalam (Gudiño León, *et.al* :2021) menyebutkan bahwa indikator konsistensi itu penting dalam program ponek, karena dalam teori komunikasi untuk indikator konsistensi, diharapkan apa yang utarakan oleh informan harus konsisten, agar tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, dan kelompok sasaran serta pihak terkait. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif (PONEK) di RSU Al-Islam H.M Mawardi.

## II. II. METODE

Desain penelitian yang digunakan adalah survei kuantitatif, populasi seluruh karyawan rumah sakit yang melaksanakan program pelayanan obstetri neonataemergency komprehensif di RSU Al-Islam H.M Mawardi berjumlah 54. Sampel penelitian menggunakan teknik total sampling. Variabel independen dalam penelitian ini adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di RSU Al Islam H.M Mawardi pada tanggal 10 sampai dengan 12 bulan November 2023. Pada penelitian ini menerapkan etika penelitian meliputi *informed consent* pada responden *anonymity* dengan menjaga kerahasiaan identitas responden, tidak mencantumkan nama lengkap responden pada lembar

pengumpulan data cukup dengan menggunakan inisial, dan *confidentiality* informasi yang diberikan oleh subjek terjamin oleh peneliti dan tidak akan disampaikan pada pihak lain yang tidak terkait dengan peneliti. Instrumen pengumpulan data pada penelitian menggunakan kuisioner. Kuisioner sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

Hasil Uji validitas menggunakan pearson product moment didapatkan hasil hasil uji analisis diperoleh  $P\text{-value} = 0,000 (<0,05)$  lebih besar dari nilai pembanding R kritis, maka kriteria tersebut dianggap valid, dengan tingkat toleransi kesalahan 0,05. Untuk menguji reliabilitas, *Cronbach's Alpha* digunakan; diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,969 lebih besar dari nilai r tabel (0,268) sehingga dapat disimpulkan kuisioner yang digunakan dalam penelitian adalah reliabel. Langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini, melakukan iizn penelitian pada tempat penelitian, kemudian Kuisioner dibagikan melalui google form, data yang diperoleh dari kuisioner menggunakan skala likert merupakan data interval dengan skala 1,2,3,4,5. Hasil isian kuisioner dilakukan rekapitulasi dalam bentuk excel kemudian dicoding untuk dimasukkan di instrumen SPSS *type 26* selanjutnya dilakukan analisis data secara *univariat* untuk menggambarkan masing-masing variabel. Data disajikan dalam bentuk tabel distribusi *frekuensi* dan *bivariat* menggunakan tabel distribusi silang untuk mengetahui pengaruh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi dengan implementasi kebijakan menggunakan uji *pearson correlation* dengan tingkat kemaknaan  $p\text{-value} \alpha < 0,005$ . Uji *pearson corelation* dilakukan karena telah memenuhi syarat uji normalitas yaitu menggunakan uji *kolmogrof-smirnof* didapatkan data terdistribusi normal

### III. HASIL & PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan terhadap tim pelaksana program pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif (PONEK) di RSUD Al-Islam H.M Mawardi berjumlah 54 responden maka diperoleh hasil penelitian meliputi data karakteristik yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, jabatan dan data khusus penelitian yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi, implementasi kebijakan. Data disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden**

Karakteristik	Responden	n	Persentase (%)
<b>Jenis Kelamin</b>	Laki-laki	12	22,2
	Perempuan	42	77,8
<b>Usia</b>	20-30 Th	17	31,5
	30-40 Th	29	53,7
	40-50 Th	8	14,8
<b>Pendidikan</b>	S1	33	61,1
	D3	21	38,9
<b>Jabatan</b>	Dokter	5	9,3
	Bidan	11	20,4
	Perawat	17	31,5
	Radiologi	1	1,9
	Laborat	5	9,3
	Farmasi	5	9,3

Berdasarkan tabel 1. Menunjukkan bahwa diketahui karakteristik responden jenis kelamin sebagian besar berjenis kelamin perempuan sebesar 77,8%, berdasarkan usia sebagian besar berusia 30-40 tahun 53,7%. berdasarkan pendidikan sebagian besar berpendidikan S1 (Sarjana) sebesar 61,1% dan berdasarkan jabatan hampir setengahnya jabatannya sebagai perawat sebesar 31,5%.

#### 2. Analisis Univariat

**Tabel 2 Distribusi Frekuensi Variabel Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi dan Implementasi Kebijakan.**

	Komunikasi		Sumberdaya		Disposisi		Struktur Birokrasi		Implementasi Kebijakan	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Baik	23	42,6%	11	20,3 %	14	26 %	36	66,6 %	44	81,4 %
Cukup	28	51,9%	29	53,7 %	28	52 %	16	29,6 %	10	18,6 %
Kurang	3	5,5 %	14	26 %	12	22 %	2	3,8 %	0	0

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui untuk variabel Komunikasi responden tim pelaksana didapatkan hasil sebagian besar komunikasi cukup (51,9%), sebagian besar Sumberdaya cukup 53,7%, sebagian besar Disposisi cukup (52%), sebagian besar Struktur Birokrasi baik (66,6%) dan hampir seluruhnya (81,4%) implementasi kebijakannya baik.

### 3. Analisis Bivariat

Hasil uji *Pearson Korelation*, disajikan berikut ini :

**Tabel 3 Tabulasi Silang Variabel Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi Dan Implementasi Kebijakan**

		Implementasi Kebijakan				Total		P-value
		cukup	%	baik	%			
Komunikasi	Kurang	1	100	0	0	1	100	0,000
	Cukup	7	30,4	16	69,6	23	100	
	Baik	2	6,7	28	93,3	30	100	
	Total	10	18,5	44	81,5	54	100	
Sumberdaya	Kurang	10	66,7	5	33,3	15	100	0,000
	Cukup	0	0	27	100	27	100	
	Baik	0	0	12	100	12	100	
	Total	10	18,5	44	81,5	54	100	
Disposisi	Kurang	5	83,3	1	16,7	6	100	0,000
	Cukup	5	19,2	21	80,8	26	100	
	Baik	0	0	22	100	22	100	
	Total	10	18,5	44	81,5	54	100	
Struktur Birokrasi	Kurang	2	100	0	0	2	100	0,000
	Cukup	8	50	8	50	16	100	
	Baik	0	0	36	100	36	100	
	Total	10	18,5	44	81,5	54	100	

Berdasarkan Tabel 3 didapatkan hasil implementasi kebijakan yang baik memiliki komunikasi yang baik dan cukup sedangkan implementasi kebijakan yang cukup memiliki komunikasi yang kurang. Berdasarkan nilai *p-value* antara komunikasi dengan Implementasi Kebijakan adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti terdapat hubungan antara variabel komunikasi dengan implementasi kebijakan.

Pada Sumberdaya, orang yang mempunyai implementasi kebijakan baik maka memiliki sumberdaya yang baik dan cukup, dibandingkan yang implementasi kebijakannya cukup maka sumberdayanya juga kurang. Berdasarkan nilai *p-value* antara Sumberdaya dengan Implementasi Kebijakan adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti terdapat hubungan antara variabel sumberdaya dengan implementasi kebijakan.

Pada Disposisi, implementasi kebijakan yang baik memiliki disposisi yang baik dan cukup daripada yang implementasi kebijakannya cukup memiliki disposisi yang kurang. Berdasarkan nilai *p-value* Disposisi dengan Implementasi Kebijakan adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti terdapat hubungan antara variabel Disposisi dengan implementasi kebijakan.

Pada Struktur Birokrasi, implementasi kebijakan yang baik memiliki struktur birokrasi yang baik sedangkan implementasi kebijakan yang cukup memiliki struktur birokrasi yang kurang dan cukup. Berdasarkan nilai *p-value* antara Struktur Birokrasi dengan Implementasi Kebijakan adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti terdapat hubungan antara variabel struktur birokrasi dengan implementasi kebijakan.

### PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian ada pengaruh komunikasi dengan implementasi kebijakan, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik komunikasi yang diterapkan maka semakin baik implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi memiliki peran yang penting sebagai acuan pelaksanaan kebijakan, menurut Edward III terdapat 3 hal yang penting dalam komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Sehingga apabila 3 hal tersebut harus terlaksana dengan baik agar komunikasi dapat berjalan efektif. Dengan komunikasi yang baik maka suatu organisasi dapat berjalan dengan baik [10]. Komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh

komunikasikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan [11].

Komunikasi yang efektif antar peserta program sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Menurut Edward III dalam Widodo (2010), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi dari seorang komunikator ke komunikan” [12]. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muazaroh dkk (2009), T.A.P, dkk (2021), dan Seputra (2020) menyatakan bahwa komunikasi mempunyai dampak terhadap implementasi kebijakan. Penelitian selanjutnya oleh (Anita Chaudhari, *et.al* :2016) juga menyatakan komunikasi merupakan faktor krusial dalam pelaksanaan suatu program tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Publik *et al.* (2020) juga mendukung temuan penelitian Rahmat (2015) menunjukkan komunikasi menguntungkan implementasi kebijakan. Penelitian selanjutnya (Kehumasan *et al.*, 2020) mengungkapkan bahwa faktor komunikasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan kesehatan.

Pada sumberdaya hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh sumberdaya terhadap implementasi kebijakan, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sumberdaya maka implementasi kebijakan dapat diterapkan semakin baik juga. Menurut Edward III dalam Widodo (2010), sumberdaya tersebut meliputi kecukupan & kualifikasi, kewenangan, informasi, sarana & prasarana. Oleh karena itu sumberdaya mempengaruhi akan keberhasilan jalannya sebuah program yang telah ditetapkan. Sumberdaya sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward IX dalam (Winarno, 2012), sumber mungkin mempunyai poin krusial dalam penegakan hukum. Strategi implementasi bisa komprehensif, akurat, dan konsisten; namun, mereka biasanya gagal ketika ada kebutuhan untuk menyesuaikan ringkasan untuk melaksanakan tugas yang diperlukan, sumber daya juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa aturan dan ketentuan tersebut konsisten dan disampaikan dengan akurat. Suatu program akan berjalan baik dengan sumber daya yang handal, karena sumber daya yang penting akan keberhasilan pelaksanaannya [13].

Edward III menyatakan bahwa operasional sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan harus dengan cara yang jelas, ringkas, dan konsisten, pelaksana tidak akan berhasil jika pelaksana, atau penguasa pelaksana, tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya [14]. Hasil penelitian tersebut merupakan hasil awal dan mendukung pendapat Ariyani, dkk (2014), Yalia (2014), Aristin & Azizah (2018) yang menyatakan bahwa fluktuasi sehari-hari berdampak buruk terhadap implementasi kebijakan. Berdasarkan temuan penelitian (Rachman, *et.al* :2022) yang dilakukan di RSUD DR.RM. Djoelham Binjai, bahwa sumberdaya manusia merupakan faktor terpenting dalam implementasi kebijakan.

Pada disposisi hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh disposisi terhadap implementasi kebijakan, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik disposisi yang dimiliki maka penerapan implementasi kebijakan juga bisa berjalan dengan baik. Menurut Winarno (2012: Klaim Edward III), faktor ketiga yang mempunyai implikasi signifikan terhadap efektifitas implementasi kebijakan adalah strategi implementasinya. Selain itu proses penyusunan kebijakan menjadi lebih sulit ketika pendapat atau cara pandang terhadap tindakan tidak sejalan dengan pendapat pembuat kebijakan tersebut. Menurut Edward III, perilaku positif terhadap kebijakan menunjukkan masyarakat termotivasi untuk melaksanakan tugasnya sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhannya untuk melakukan perubahan. Disposisi adalah karakteristik atau watak yang dimiliki implementor meliputi komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Sikap implementor yang positif/baik maka akan membawa organisasi untuk menjalankan kebijakan dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan [15]

Setiap program harus mempunyai karakter yang mewujudkan komitmen. Kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat terwujud,” menurut Edward III dalam Widodo (2010). Apabila pelaksanaannya dilakukan dengan personel yang berkompeten maka program dapat terlaksana sebagaimana dimaksud oleh penyusun kebijakan. Hal ini terkait dengan penelitian yang dilakukan Arifman (2023) Berdasarkan hasil analisis terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel disposisi terhadap implementasi kebijakan hal ini didukung oleh penelitian Herdiana (2021) yang menyatakan bahwa disposisi mempunyai pengaruh terhadap implementasi kebijakan.

Pada Struktur birokrasi hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi kebijakan yang dimiliki maka penerapan implementasi kebijakan akan menjadi semakin baik. Struktur birokrasi adalah norma, peraturan, dan jenis hubungan yang sering terjadi dalam suatu badan eksekutif yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan secara potensial dan nyata. Birokrasi sebagai implementasi suatu kebijakan harus mampu mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politis dengan mengambil tindakan pendekatan koordinasi yang bijaksana. Menurut Edward III, dua ciri yang dapat menjadikan struktur organisasi atau budaya kerja lebih efektif adalah pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melakukan fragmentasi. Dengan adanya Struktur Birokrasi maka struktur organisasi yang menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal dan penting dalam menggerakkan pelaksana agar kegiatan sesuai dengan standar. [13].

SOP merupakan seperangkat pedoman tugas rutin yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Fragmentasi diartikan sebagai upaya mengatasi hambatan dan tetap fokus dalam menjalankan berbagai tugas pada unit yang berada di bawahnya [12]. Terlepas dari ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada, atau pemahaman pekerja mengenai apa yang harus mereka lakukan dan seberapa besar keinginan mereka untuk menyelesaikan tugas tersebut, kemungkinan besar tugas tersebut tidak akan terselesaikan atau terealisasi. Dengan bekerja sama, seluruh pihak yang terlibat harus menyadari betapa rumitnya proses penerapan suatu kebijakan. Sebagai salah satu pilar utama kerja, birokrasi harus mampu secara efektif menyampaikan kebijakan-kebijakan yang dibicarakan secara santun melalui hadirnya lapangan kerja yang saling menguntungkan [3].

Hal ini sejalan dengan pernyataan Edward III dalam Winarno (2012), yang menyatakan bahwa manajer dapat mengoptimalkan waktu mereka untuk menugaskan kegiatan staf dalam organisasi dengan menggunakan prosedur operasi standar. Dalam pelaksanaan program, ketekunan, keuletan, dan koordinasi antarpribadi sangat penting. Koordinasi antar tugas program PONEK diperlukan untuk mencapai tujuannya secara efektif. Fragmentasi dan Prosedur Operasi Standar (SOP), adalah dua aspek administratif yang saling terkait. Temuan penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifman (2023) dan T.A.P., dkk (2021) yang menunjukkan bahwa struktur birokrasi berdampak pada implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan yaitu suatu cara atau proses agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan dalam hal ini yang dimaksud yaitu kebijakan Program Pelayanan Obstetri Neonatal Komprehensif di RSUD AL – Islam H.M Mawardi. Keberhasilan implementasi kebijakan mengharuskan para pelaksana program untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu persiapan proses implementasi kebijakan harus melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterpretasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik dan menyediakan layanan dan manfaat pada masyarakat [10]. Oleh karena itu, implementasi kebijakan tersebut akan sangat terhambat oleh sikap penerapannya. Jika pelaksanaannya mendapat dukungan positif, maka akan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

Implementasi kebijakan tidak hanya harus menemukan apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa ini diterapkan dengan efektif [14]. Kebijakan implementasi sangat bergantung pada tujuan atau sasaran perilaku atau karakteristik pelaksanaan. Faktor penting yang harus dimiliki oleh para pembuat kebijakan adalah komitmen dan penilaian yang kuat. Komitmen yang kuat dari aktivis politik selalu mendorong mereka untuk menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab mereka sesuai dengan undang-undang. Di sisi lain, integritas mendorong aktivis politik untuk mempertahankan prinsip-prinsip program yang telah ditetapkan sebelumnya. Sikap para pelaksana kebijakan sangat memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan dapat dilaksanakan dengan cara yang diinginkan pemimpin jika mereka memiliki sikap positif; jika tidak, kebijakan tersebut tidak akan dilaksanakan secara adil [14].

#### IV. SIMPULAN

Komunikasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, Sumberdaya berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, Disposisi berpengaruh terhadap Implementasi kebijakan, dan Struktur Birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan di RSUD AL Islam H.M Mawardi. Dikarenakan Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi berhubungan dengan proses implementasi kebijakan program PONEK di RSUD AL-Islam H.M Mawardi maka perlunya dikontrol dan ditingkatkan lagi agar implementasi kebijakan tetap terlaksana dengan baik dan mencapai target yang ditentukan.

#### V. UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih sebanyak banyaknya kepada RSUD AL-Islam H.M Mawardi Krian Sidoarjo yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian dan terima kasih juga untuk Kepala Program Studi S1 Kebidanan dan Profesi, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah mendukung penelitian ini.



